

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja. Yang dikemudian hari disempurnakan dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD atau APBN.

dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Serta Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja (PK) , Pelaporan Kinerja dan tata cara review tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Tujuan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Dalam Inpres Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik.

Setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), tujuan mengimplementasikan Sistem AKIP tersebut adalah untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap Penetapan perencanaan strategi, Pengukuran kinerja, Pelaporan kinerja dan Pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Sedangkan manfaat yang akan didapatkan dari LKjIP adalah sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program, dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

B. Data Umum Organisasi

1.1. Dasar Hukum

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati.

1.2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Keputusan Bupati Pati Nomor 56 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati, sebagai berikut :

a. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.
- 2). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintah daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.
- 4). Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan daerah bidang Perdagangan dan bidang Perindustrian.

- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tersebut diatas Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 14 (empat belas) orang Ka.Subbag / Kasi. Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Program.
 2. Subbagian Keuangan.
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan.
 2. Seksi Industri Logam Mesin Elektronik dan Aneka.
 3. Seksi Pengembangan Standar Mutu dan Informasi Industri.
- d. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
 1. Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan.
 2. Seksi Perlindungan Konsumen.
 3. Seksi Distribusi dan Informasi Perdagangan.
- e. Bidang Pengelolaan Pasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan.
 2. Seksi Retribusi, Perijinan dan Penagihan.
 3. Seksi Ketertiban dan Kebersihan.
- f. Bidang Promosi dan Ekspor Impor
 1. Seksi Promosi Produk Daerah.
 2. Seksi Ekspor Impor.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional,
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

D. SDM dan Sarana Prasarana Disdagperin Kabupaten Pati

a. SDM

Pegawai Disdagperin Kabupaten Pati pada posisi akhir tahun 2018 sebanyak 192 pegawai, yang terdiri dari 22 orang pejabat struktural, 9 orang pejabat fungsional, dan 167 orang staf. Adapun dari jumlah tersebut, yang termasuk Golongan IV ada 12 orang, Golongan III ada 60 orang, Golongan II ada 110 orang, dan Golongan I ada 10 orang. Pegawai yang menempuh pendidikan terakhir S2 sebanyak 10 orang, S1 sebanyak 44 orang, Sarjana Muda sebanyak 4 orang, SLTA sebanyak 113 orang, SLTP sebanyak 11 orang, dan SD sebanyak 10 orang.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana yang ada di Disdagperin Kabupaten Pati antara lain adalah:

- Gedung kantor di Jl. Pati Kudus KM 4 Pati
- Kendaraan Roda Enam sebanyak 1 unit
- Kendaraan Roda Empat sebanyak 13 unit
- Kendaraan Roda Dua sebanyak 78 unit

E. Sistematika Penyajian LKjIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati 2020 merupakan salah satu wujud pertanggung jawaban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati kepada publik atas kinerja pencapaian visi dan misinya pada Tahun Anggaran 2020. Selain itu, LKjIP juga merupakan salah satu parameter yang digunakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati untuk meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyusunan LKjIP Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang , Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja (PK),

Pelaporan Kinerja dan tata cara review tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), maka sistematika penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Perencana Kinerja
- Bab III : Akuntabilitas Kinerja
- Bab IV : Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A.1. Capaian Kinerja Organisasi.

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai institusi yang merumuskan kebijakan teknis pemerintah daerah dibidang Perdagangan dan Perindustrian, untuk itu Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati telah menyusun rencana strategi yang merupakan implementasi RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2017–2022 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati yang mencakup tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2020 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

1.1. **Visi** Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pati Tahun 2017-2022 adalah:

“Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”

1.2. Guna mewujudkan Visi tersebut terdapat **Misi** yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati, yaitu:

“Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian, perdagangan, dan industri”.

Sedangkan Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati dapat dilihat didalam Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Tahun 2020**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1,	Meningkat nya produktiv itas dan inovasi bidang perdagang an dan industri.		Pertumbuhan PDRB Lapangan Usaha Perdagangan	4,8	5,2	5,6	5,8	6
			Pertumbuhan PDRB Lapangan usaha perindustrian	4,6	4,87	5,2	5,4	5,5
			Pertumbuhan nilai ekspor	5,5	6	6	6,5	7
			Peningkatan prosentase kualitas sarana dan prasarana perdagangan	25	30	35	40	45
		Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian	Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e comerce	2	3,5	4	4	5
			Pertumbuhan IKM	7,4	7,6	7,6	8	8,3
			Pertumbuhan industri berbasis agro	6,8	7,2	7,7	8	8,3

2.	Meningkatnya daya saing perdagangan dan industri	Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif.	Pertumbuhan produktifitas komoditas unggulan di sektor industri	5	5,5	6	7	8
			Pertumbuhan industri kreatif daerah	5,5	6	6,5	7	8
			Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor industri.	5	5,5	6	7	8

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2020

Dalam Rencana Kinerja Tahunan SKPD terdapat 3 (tiga) sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam Perekonomian.
2. Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian.
3. Menngkatnya produksi produk unggulan dalam sektor industri dan SDM industri kreatif.

B.1 PROGRAM

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama dengan masyarakat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Di dalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Program dimaksud

dilaksanakan dengan didukung oleh Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan DPPA Tahun Anggaran 2020, yang jumlahnya sebesar Rp.21.002.169.000,- (Belanja Langsung) dan Rp.15.709.140.000,- (Belanja tidak Langsung).

Secara teknis Program tersebut dijabarkan ke dalam 69 (enam puluh tiga) kegiatan yang masing-masing anggarannya disusun berdasarkan DPA dan DPPA Tahun Anggaran 2020. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain adalah :

1. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa.
2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrolagian daerah.
3. Penyelenggaraan pasar murah.
4. Analisis harga kebutuhan pokok masyarakat.
5. Pengawasan distribusi dan harga gas elpiji.
6. Pengawasan distribusi dan harga pupuk.
7. Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu.
8. Peningkatan pengawasan standar mutu.
9. Pemantauan bahan bakar minyak
10. Penyusunan kebijakan industri terkait dan industri penunjang industri kecil dan menengah
11. Pemantauan pengawasan dana bergulir dan kemitraan
12. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri di Lingkungan Industri Hasil Tembakau
13. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK makanan ringan di lingkungan IHT
14. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK konveksi dan border di lingkungan IHT
15. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK jasa perbengkelan di lingkungan IHT
16. Promosi produk industri di lingkungan Industri Hasil Tembakau (IHT)
17. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan di lingkungan IHT
18. Membangun jejaring dengan eksportir
19. Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor
20. Pelatihan teknis manajemen ekspor impor

21. Perluasan SNI untuk mendorong daya saing industry manufaktur
22. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK kerajinan
23. Pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga ke hilir
24. Peningkatan system jaringan informasi perdagangan
25. Intensifikasi pendapatan pasar
26. Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan pasar
27. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan
28. Pembinaan dan penertiban pedagang pasar
29. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/pasar
30. Penyediaan perlengkapan dan peralatan pasar beserta pendukungnya
31. Sosialisasi tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol
32. Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, nyaman dan aman
33. Fasilitasi kemudahan perijinan pengembangan pedagang pasar
34. Pengembangan promosi industri dan perdagangan
35. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan / pasar
36. Fasilitasi pengembangan usaha jasa catering di lingkungan IHT
37. Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan asongan
38. Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kaki lima dan asongan
39. Pemberdayaan usaha bagi PKL dan asongan di lingkungan IHT
40. Pengembangan dan pelatihan sentra-sentra industri

Dalam melaksanakan proses pengukuran kinerja nantinya, perlu didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *key performance indicator* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022,

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2020 dan Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2020.

Indikator Kinerja Utama untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
1.	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha Perdagangan	5,6
2.	Pertumbuhan PDRB lapangan usaha industri	5,2
3.	Pertumbuhan nilai ekspor	6
4,	Peningkatan prosentase kualitas sarana dan prasarana perdagangan	35
5.	Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e comerce	4
6.	Pertumbuhan IKM	7,6
7.	Pertumbuhan industri berbasis agro	7,7
8.	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan di sektor industri	6
9.	Pertumbuhan industri kreatif daerah	6,5
10.	Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor Industri.	6,5

Untuk melaksanakan perencanaan kinerja tahunan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) diperlukan Rencana Kinerja Tahunan OPD.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perdagangan dan Perindustrian untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2020

Nama OPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Pati
Tahun : 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian	Pertumbuhan nilai ekspor	6 %
	Peningkatan prosentase kualitas sarana dan prasarana perdagangan.	35 %
	Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e commerce.	4 %
Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian.	Pertumbuhan IKM	7,6 %
	Pertumbuhan industri berbasis agro.	7,7 %
Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industry kreatif.	Pertumbuhan produksi produk unggulan sektor industri.	6.5 %

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan Kinerja (Tapkin) adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan

perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2020 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA OPD) 2020 dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017-2022, Kebijakan Umum Anggaran (KUA), APBD Tahun 2020 dan Strategi dan Prioritas APBD Tahun 2020.

Dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) 2020 menunjukkan bahwa sasaran yang ingin dicapai ada sebanyak 3 (tiga) sasaran, sedangkan program prioritas ada 5 (lima), kegiatan sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan anggaran sebesar Rp.12.889.965.750,-

Penetapan Kinerja (Tapkin) secara lengkap untuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati Tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati adalah perwujudan kewajiban Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2020 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlu kiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Utama. Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *key performance indicator* yaitu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) kinerja utama yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya .

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2017 - 2022, untuk tahun 2020 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis. Seluruh program dan kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 3 (tiga) sasaran Renstra OPD.

Hasil pengukuran kinerja utama menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 3 (tiga) sasaran dapat dilihat pada uraian dibawah ini.

A.1. PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA

Sasaran pertama adalah Meningkatnya kontribusi Perdagangan dalam perekonomian. Hasil pengukuran kinerja sasaran pertama pada tabel 1.berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja pada sasaran pertama untuk Program dan kegiatan Tahun 2020.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kontribusi perdagangan dalam perekonomian	Pertumbuhan nilai ekspor	6 %	-2.07 %
		Peningkatan prosentase kualitas sarana dan prasarana perdagangan.	35 %	31,82 %
		Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e-commerce.	4 %	27,77 %

Indikator kinerja pertumbuhan ekspor dengan target 6 % tercapai -2.07% dikarenakan lemahnya dukungan anggaran biaya promosi, melambatnya perekonomian dunia akibat pandemi covid-19 dan kendala ketersediaan Kontainer dan Kapal Pengangkut. Kegiatan yang mendukung indikator tersebut antara lain :

- 1, Membangun jejaring dengan eksportir
- 2, Konsultasi bisnis dan perdagangan ekspor
- 3, Pelatihan teknis manajemen ekspor / impor
- 4, Promosi Produk industri dilingkungan Industri hasil tembakau

- 6, Pengembangan promosi industri dan perdagangan.
- 6, Pembinaan dan pengembangan usaha dan standar mutu
- 7, Peningkatan Pengawasan standar mutu

Indikator yang kedua yaitu prosentase kualitas sarana dan prasarana perdagangan menunjukkan dari target **35 %** tercapai **31,82 %** dikarenakan adanya pandemic covid-19.

Kegiatan yang mendukung indikator kedua dapat dilihat dibawah ini:

1. Pembangunan sarana dan prasarana perdagangan/ pasar
2. Pengembangan sarana dan prasarana perdagangan/ pasar
3. Penyediaan penyediaan perlengkapan pasar beserta pendukungnya
4. Pengembangan pasar penunjang untuk pasar tradisional yang bersih, aman dan nyaman
5. Pemeliharaan rutin berkala sarana dan prasarana perdagangan

Indikator ketiga yaitu Peningkatan prosentase IKM yang menggunakan e comerce dengan target sebesar **3,5%** tercapai **27,77 %** hal ini menunjukkan ada peningkatan penggunaan sistem online di dunia maya (internet) untuk memasarkan produknya. Kegiatan yang mendukung indikator sasaran tersebut adalah :

1. Pengembangan promosi industri dan perdagangan
2. Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan.

Sasaran kedua adalah meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam prekonomian, Indikatornya ada 2 yaitu, pertumbuhan IKM dan pertumbuhan industri berbasis agro. Untuk realisasi sasaran yang kedua dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja pada sasaran kedua untuk Program dan Kegiatan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya kontribusi industri manufaktur dalam perekonomian	Pertumbuhan IKM	7,6 %	7,75 %
		Pertumbuhan industri berbasis agro	7,7 %	7,24 %

Dari prosentase capaian kinerja utama menunjukkan capaian 7,75 % dan 7,24 %. Dari prosentase capaian kinerja utama untuk pertumbuhan industri berbasis agro menunjukkan prosentase yang menurun, dikarenakan perencanaan dan pengelolaan teknologi oleh skala menengah dinilai kurang memperhatikan kualitas, kemampuan proses pengolahan, penggunaan kapasitas, kemampuan manajemen.

Hasil ini diperoleh dari hasil kegiatan yang diikuti oleh UKM di beberapa lokasi. Antara lain:

1. Pembinaan kemampuan teknologi industri dilingkungan industri hasil tembakau.
2. Pelatihan peningkatan teknologi proses teknis produksi IK Makanan ringan dilingkungan IHT

Sasaran ketiga Meningkatkan produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif. Sedangkan capaian untuk hasil pengukuran kinerja sasaran ketiga pada tabel 1 berikut :

Tabel 3.3 Capaian kinerja pada sasaran ketiga untuk program dan kegiatan Tahun 2020

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya produksi produk unggulan sektor industri dan SDM industri kreatif	Pertumbuhan produktivitas komoditas unggulan disektor industri.	6%	6.54 %

Dari prosentase capaian kinerja utama menunjukkan prosentase yang meningkat, tersedianya anggaran yang diperuntukan bagi kegiatan pelatihan industri kecil dan menengah khususnya industri manufaktur sehingga Dinas Perdagangan dan Perindustrian menambah pelatihan – pelatihan terhadap IKM yang ada di Kabupaten Pati.

A.2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN 2018, 2019, 2020, 2021, DAN 2022 YANG TERDAPAT PADA PERENCANAAN STRATEGIS (RENSTRA DINAS)

Realisasi Kinerja dalam LAKjIP Tahun 2020 dikarenakan sebagai pelaksanaan Renstra tahun 2017-2022 tahun yang pertama, maka belum bisa diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Dikarenakan Renstra sebelumnya sistem perhitungan juga berbeda.

A.3. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBERDAYA.

Apabila dibandingkan dengan Sumber daya Manusia yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati terdapat kekurangan tenaga aparatur yang dapat diandalkan untuk dapat mem “back up” semua tugas dilapangan maupun tugas administrasi. Mencakup kewenangan yg ada di Disdagperin, yaitu

perdagangan dan perindustrian, diperlukan tambahan personil yang akan ditempatkan dilapangan maupun sebagai tenaga administrasi dan personil pemikir yang akan dapat merencanakan tugas ke depan guna mendukung Renstra OPD ataupun Rencana Kerja Tahunan yang harus diselesaikan setiap tahun. Dengan keberhasilan yang nyata dibandingkan dengan SDM yang tersedia, menunjukkan efisiensi yg cukup tinggi dalam pemanfaatan sumber daya manusia. Secara umum sarana dan prasarana yang ada dapat mendukung semua kegiatan yang ada, walaupun secara jumlah, sarana dan prasarana (seperti kendaraan bermotor roda 4 dan roda 2) masih belum mencukupi seluruhnya.

B. REALISASI ANGGARAN.

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah dengan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Adapun anggaran yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati tahun 2020 adalah Rp. 21.002.169.000,- realisasi anggaran sebesar Rp. 20.435.311.624,- atau 97,30 %. Tidak semuanya anggaran terserap, dikarenakan ada beberapa kegiatan yang mempunyai sisa anggaran yang tidak digunakan / tidak dicairkan dikarenakan ada sisa lelang .

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2020, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berkaitan dengan keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian sasaran, antara lain sebagai berikut :

- A. Keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran secara umum disebabkan :
1. Mekanisme perencanaan yang detail dan selektif.
 2. Penganggaran sesuai kebutuhan.
 3. Pencairan anggaran kegiatan tepat waktu.
 4. Pelaksanaan anggaran sesuai dengan DPA dan tepat waktu.
 5. Ada keberhasilan lain dari Disdagperin yang tidak masuk indikator kinerja tetapi merupakan prestasi yang cukup menunjukkan tingginya kinerja dan menambah PAD Kabupaten, yaitu terpenuhi target sebesar Rp. 5.553.613.000 dengan realisasi sebesar Rp.6.010.698.829 (108,23 %).
- B. Hambatan / kendala yang dihadapi dalam upaya mencapai sasaran yang dinilai kurang berhasil adalah sebagai berikut :
1. Sinkronisasi penganggaran dengan kegiatan lain.
 2. Jadwal anggaran yang bersamaan dengan kegiatan-kegiatan lainnya.

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dalam upaya melakukan peningkatan kinerja, strategi yang ditempuh antara lain adalah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi kegiatan, program dan kinerja dengan mendasarkan pada indikator utama , pengukuran kinerja, serta sasarnya.

2. Evaluasi jadwal kegiatan
3. Evaluasi kegiatan

C. PEMECAHAN MASALAH

Langkah-langkah yang diperlukan dalam pemecahan masalah adalah sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi perencanaan kegiatan.
2. Sinkronisasi penjadwalan kegiatan (anggaran kas)
3. Penganggaran yang tepat waktu.

Kiranya LKjIP Tahun 2020 ini dapat menjadi acuan kinerja untuk kegiatan yang akan datang, sehingga menjadi lebih baik.